PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Rasakunda Gang. Delima Siam VI Kecamatan Girimaya Kode Pos : 33143
E-mail : dpppakb@Pangkal Pinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKAL PINANG
Nomor : 900/ 01 /KEP/DPPPAKB/I/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENGADAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Perubahan batas daerah Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4792);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6523);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 350);
16. Peraturan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KP/KPTS/2003 tentang petunjuk pelaksanaan Pengadaan jasa konstruksi oleh instansi pemerintah;

17. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 tanggal 18 Oktober 2024;
18. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2010 Nomor 08, seri D Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 62) 30 Desember 2025;
20. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182);
21. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 312) 30 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama yang tercantum tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026

KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan

1. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi:**
   a. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
   b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
   c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian
   d. Menyetujui rancangan kontrak;
   e. Menetapkan HPS;
   f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
   g. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli;
   h. Mengusulkan perubahan Jadwal Kegiatan;
   i. Menetapkan Tim Pendukung;
   j. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   k. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
   l. Mengendalikan Kontrak ;

m. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
n. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
o. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
p. Menilai kinerja Penyedia.

1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :
   - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

2. Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang /jasa PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
c. Menyiapkan dokumen anggaran baik yang mencangkup dokumen adminisi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

3. Pejabat Pegadaan meliputi ;
a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung
b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan kontruksi jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai banyak Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan
d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2026

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pangkal Pinang
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Pangkal Pinang

Drs. Agustu Afendi, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.196708091994031004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan KB Kota Pangkal Pinang
Nomor : 900/01 /KEP/DPPPAKB/i/2026
Tanggal : 07 Januari 2026

PENUNJUKKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2026
LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB KOTA PANGKAL PINANG

	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN PADA SATUAN KERJA	JABATAN DALAM KEGIATAN	PLAPOND DANA (Rp)	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Ratna Juwita, S.Sos, MM NIP. 197202141998032003	Pembina Tk I, IV/b	Sekretaris	PPK	3.427.280.037	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					11.998.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					40.013.150	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					28.676.650	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					200.459.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					85.459.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					729.728.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					30.459.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					72.487.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					37.109.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					143.060.000	Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
					176.200.000	Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

2.	Muarofah, S.Sos NIP. 198109262008042001	Penata Tingkat I, III/d	Analis Kebijakan Ahli Muda	PPK	20.000.000	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
					63.750.000	Advokasi dan sosialisasi Pencegahan Ktp dan TPPO Kpada Pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten / Kota
					86.190.000	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangn Kabupaten/Kota
					63.000.000	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.	Dwidy Sutiasmi, S.E NIP. 197803112005012008	Pembina, IV/a	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	PPK	15.750.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
					39.800.000	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
					246.065.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
					15.750.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Keompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
					963.600.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
					30.600.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
					28.199.500	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
					485.890.500	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

4.	Misnati, SP NIP. 196807111998032005	Pembina, IV/a	Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	PPK	40.800.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
					25.200.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
					105.780.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan KB Kota Pangkalpinang

Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.196708091994031004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan KB Kota Pangkalpinang
Nomor : 900/ 01 /KEP/DPPPAKB/I/2026
Tanggal : 07 Januari 2026

PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2026
LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB KOTA PANGKALPINANG

	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN PADA SATUAN KERJA	JABATAN DALAM KEGIATAN	PLAPOND DANA (Rp)	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Mirna Feliana,S.IP NIP. 198505192010012023	Penata Tk.I, III/d	Perencana Ahli Muda	PPTK	3.427.280.037	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.	Supriati, S.AP NIP. 197306232007012005	Penata Tk.I, III/d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	PPTK	11.998.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					40.013.150	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					28.676.650	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					200.459.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					85.459.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					729.728.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					30.459.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					72.487.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					37.109.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.	Meryance, S.E NIP.198303282010012016	Penata Tk.I, III/d	Kepala UPTD.PPA	PPTK	143.060.000	Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
					176.200.000	Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

4.	Sherlly Okvitaria, S.Sos NIP. 197910072006042009	Pembina, IV/a	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPTK	20.000.000	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
					63.750.000	Advokasi dan sosialisasi Pencegahan Ktp dan TPPO Kpada Pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten / Kota
					86.190.000	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangn Kabupaten/Kota
					63.000.000	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
5.	Darima, S.STP NIP. 199010212010102001	Penata Tingkat I, III/d	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	PPTK	28.199.500	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
					485.890.500	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
6.	Emilia, SKM NIP. 198112022006042012	Penata Tk.I, III/d	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	PPTK		
					15.750.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
					39.800.000	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
					246.065.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
					15.750.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Keompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
					963.600.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
					30.600.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
7	Erwan Alfano, SKM., M.KM NIP. 197706112000031002	Pembina, IV/a	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	PPTK	40.800.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
					25.200.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

					105.780.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan KB Kota Pangkalpinang

Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.196708091994031004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan KB Kota Pangkalpinang
Nomor : 900/ 01 /KEP/DPPPAKB/I/2026
Tanggal : 07 Januari 2026

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG JASA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2026
LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB KOTA PANGKALPINANG

	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN PADA SATUAN KERJA	JABATAN DALAM KEGIATAN	PLAPOND DANA (Rp)	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Erwin Christian, S.T NIP. 19950918 202203 1 008	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Peertama Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang	Pejabat Pengadaan	3.427.280.037	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					11.998.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					40.013.150	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					28.676.650	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					200.459.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					85.459.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					729.728.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					30.459.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					72.487.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					37.109.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					20.000.000	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
					63.750.000	Advokasi dan sosialisasi Pencegahan Ktp dan TPPO Kpada Pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten / Kota
					86.190.000	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangn Kabupaten/Kota
					63.000.000	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota

					40.800.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
					25.200.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
					105.780.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
2.	Saipul Ramdoni, S. KM NIP. 19780720 200312 1 003	Penata Tk. I /III.d	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang	Pejabat Pengadaan	143.060.000	Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
					176.200.000	Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
					15.750.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
					39.800.000	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
					246.065.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP
					15.750.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Keompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
					963.600.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
					30.600.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
					28.199.500	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
					485.890.500	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan KB Kota Pangkalpinang

Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.196708091994031004